



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 BAU-BAU

JALAN RAYA PALAGIMATA KOTA BAU-BAU (93721) TELEPON: (0402)2821121
SUREL: KPPN103@KEMENKEU.GO.ID LAMAN: DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/BAUBAU

Nomor : S-474/KPN.2802/2022 11 November
2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Monitoring Penggunaan Transaksi Non Tunai pada Rekening Virtual
Pengeluaran Satuan Kerja Lingkup KPPN Bau-Bau

Yth. Seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Lingkup KPPN Bau-Bau

Sehubungan dengan Penggunaan Transaksi Non Tunai pada Rekening Virtual Pengeluaran Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III 2022, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 terkait dengan permasalahan kas pada bendahara, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memperbaiki mekanisme pengelolaan kas di Kementerian Negara/Lembaga untuk memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas yang dapat menimbulkan kerugian negara.
2. Salah satu rencana aksi terhadap temuan tersebut ialah melakukan upaya peningkatan budaya cashless melalui identifikasi dan sosialisasi untuk mendorong penggunaan *Cash Management System* (CMS) dan implementasi transaksi non tunai.
3. Berdasarkan data dari perbankan atas penggunaan CMS pada rekening virtual pengeluaran hingga September 2022 pada KPPN Bau-Bau, dari 111 rekening virtual yang telah dibuka, baru 12 (11%) yang tercatat telah menggunakan CMS. Sementara itu, 99 (89%) rekening virtual belum menggunakan fitur CMS sama sekali.
4. Berkenaan dengan hal di atas, dalam rangka meningkatkan penggunaan CMS, diminta satuan kerja untuk:
 - a. Meningkatkan penggunaan CMS untuk transaksi pada bendahara pengeluaran seperti penggunaan platform Digipay, pembayaran honorarium, perjalanan dinas, maupun pembayaran kepada pihak ketiga;
 - b. Dalam hal satker mengalami kendala berupa user belum diterima/belum diaktivasi/telah bertransaksi menggunakan CMS tetapi belum masuk di *monitoring*, agar mengisi formulir pada tautan <https://bit.ly/KendalaCMS> untuk selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Bank Pusat.
5. Pada tingkat pusat, melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah bekerja sama dengan Bank Pusat terus mendorong pemanfaatan sarana non tunai melalui eselon I Kementerian Negara/Lembaga.
6. Progress penggunaan CMS oleh satuan kerja lingkup KPPN Baubau akan terus dimonitor sebagai tindak lanjut rencana aksi atas temuan BPK dimaksud.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan secara SIGAP: Sinergi, Integritas, Gigih, Amanah, Profesional.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A2
Bau-Bau



Ditandatangani secara elektronik
Hariyanto

